

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Menurut Melmambessy Moses pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat merubah sikap tingkah laku, kedewasaan berpikir dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan formal dan pendidikan informal.¹

Kemudian, menurut Sugihartono, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia tersebut melalui proses pengajaran dan pelatihan.

Menurut Teguh Triwiyanto, pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan

¹ Melmambessy Moses, "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua," *Media Riset Bisnis & Manajemen* 12, no. 1 (2012): h. 18-36.

individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.²

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa akan ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan dari suatu bangsa tersebut.

2. Fungsi Pendidikan

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di kemukakan bahwa fungsi pendidikan yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³

² Teguh Triyanto, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 23-24.

³ “Undang-undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 3 Tahun 2003” (Pemerintah Pusat, 2003).

Untuk mencapai fungsi tersebut, pendidikan diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal).

3. Unsur-unsur Pendidikan

Unsur-unsur dalam pendidikan meliputi beberapa hal yang saling terkait. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional termuat dalam UU Sisdiknas, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara pendidik dan peserta didik.
- c. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- d. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur,

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

- e. Interaksi edukatif adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- f. Isi pendidikan merupakan materi-materi dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. ngkan kearah yang lebih baik lagi.
- g. Lingkungan pendidikan adalah tempat manusia berinteraksi timbal balik sehingga kemampuannya dapat terus dikemb ngkan kearah yang lebih baik lagi. Lingkungan pendidikan sering dijabarkan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat.⁴

4. Tujuan Pendidikan

Pendidikan sebagai sebuah usaha sadar tentunya memerlukan tujuan yang dirumuskan. Karena tanpa tujuan, maka pelaksanaan pendidikan akan kehilangan arah. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai sebuah pedoman bagaimanakah proses pendidikan seharusnya dilaksanakan, dan hasil apa yang diharapkan dalam proses pendidikan.

Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk

⁴ Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, h. 24-26.

mencapai tujuan-tujuan lain. Di samping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang diimpikan, dan yang terpenting adalah dapat memberi penilaian atau evaluasi terhadap usaha-usaha pendidikan. Tujuan pendidikan adalah hal pertama dan terpenting dalam merancang, membuat program, serta mengevaluasi pendidikan.

Berdasarkan TAP.MPR No.II/MPR/1993, tentang GBHN dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertinggi semangat kebangsaan agar tumbuh manusia-manusia pembangunan yang dapat 21 membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Adapun tujuan pendidikan terbagi atas empat yaitu:⁵

a. Tujuan Pendidikan Nasional

Merupakan tujuan pendidikan secara umum yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia secara nasional yaitu mewujudkan manusia Pancasila.

b. Tujuan Institusional

Merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap institusi atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional ini berbeda antara lembaga pendidikan yang satu dengan lembaga pendidikan lainnya. Misalnya

⁵ “Blog Dunia Pendidikan: Tujuan Pendidikan,” diakses 1 Juli 2021, <http://ferdy-nasum.blogspot.com/2011/10/tujuan-pendidikan.html>.

tujuan lembaga pendidikan sekolah dasar tentu berbeda dengan tujuan pendidikan pada lembaga sekolah menengah dan sekolah tinggi. Selain itu, tujuan pendidikan kejuruan tentu berbeda dengan tujuan pendidikan sekolah umum. Jika setiap lembaga pendidikan dapat mencapai tujuan pendidikannya berarti tujuan pendidikan nasional pun sudah tercapai.

c. Tujuan Kurikuler

Merupakan tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada masing-masing bidang studi. Tujuan kurikuler antara bidang studi yang satu berbeda dengan tujuan kurikuler pada bidang studi lainnya. Misalnya tujuan IPA, IPS atau Matematika.

d. Tujuan Instruksional

Merupakan tujuan yang ingin dicapai pada setiap pokok bahasan dalam suatu bidang studi. Tujuan instruksional inilah yang dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disebut sebagai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik sehingga dapat dikatakan telah tuntas belajar.

5. Jalur Pendidikan

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Menurut Teguh Triwiyanto, jalur pendidikan itu dapat ditempuh melalui beberapa jenis pendidikan yaitu:

a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

b. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, seperti halnya Pendidikan Pondok Pesantren yang statusnya sendiri merupakan suatu instansi Pendidikan nonformal yang dampak serta hasilnya tidak dapat diragukan lagi.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar Nasional Pendidikan.

c. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikannya diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.⁶

B. Nasionalisme dan Hubbul Wathan Minal Iman

1. Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme berasal dari kata nation yang dipadankan dengan bangsa-bangsa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian antropologis serta sosiologis, dan dalam pengertian politis. Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat. Sedangkan yang dimaksud bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama, dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi.⁷

Menurut pengertian lain, Nasionalisme berasal dari kata nation yang mempunyai arti bangsa, sedangkan kata bangsa sendiri memiliki arti: (1) kesatuan orang yang bersamaan asal suatu keturunan, sejarah, adat, dan

⁶ Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, h. 120-122.

⁷ Mursidin, "Pendidikan Agama Islam Berbasis Nasionalisme," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019): h. 566-567, <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i1.4515>.

bahasa, yang memiliki pemerintahan sendiri; (2) golongan yang terdiri dari manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama, rasa atau suku dan sifat khas yang sama atau bersamaan; dan (3) kumpulan manusia yang biasanya mempunyai suatu ikatan karena adanya kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Dari beberapa makna kata bangsa di atas, menunjukkan arti bahwa bangsa adalah satu kesatuan yang timbul dari kesamaan keturunan, pemerintahan, budaya, dan tempat. Pengertian ini berkaitan dengan arti kata suku yang dalam kamus yang sama diartikan sebagai golongan orang-orang (keluarga) dalam satu keturunan; golongan bangsa sebagai bagian dari suatu bangsa yang besar. Beberapa suku, golongan atau ras dapat menjadi bentuk sebuah pemerintahan yang ditaati secara bersama.⁸

Nasionalisme adalah suatu wujud kecintaan alamiah terhadap tanah air, suatu kesadaran yang mendorong terhadap terbentuknya sebuah kedaulatan dan kesepakatan untuk membentuk suatu negara berdasarkan kebangsaan yang telah disepakati dan dijadikan sebagai sebuah pijakan pertama dan tujuan dalam menjalani kegiatan kebudayaan dan ekonomi suatu negara.⁹

Dari beberapa pengertian di atas, Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu bangsa atau masyarakat yang memiliki kesamaan dalam keturunan, suku, budaya serta tempat tinggal yang mempunyai satu ikatan

⁸ M HusinAffan dan Hafidh Maksum, "Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia dalam Menangkal Budaya Asing di Era Globalisasi," 2016, h. 67.

⁹ HusinAffan dan Maksum, h. 67.

atau tujuan sama yang mempunyai kecintaan alamiah terhadap tanah airnya, suatu ikatan serta kesadaran bersama dalam menjunjung tinggi kedaulatan dan kesepakatan untuk membentuk suatu negara berdasarkan asas kebangsaan, persatuan dan kesatuan yang telah disepakati bersama dan dijadikan sebagai pedoman kenegaraan yang akan dipertahankan bersama serta menjunjung tinggi harkat martabat negaranya.

2. Hubbul Wathan Minal Iman

Sejak kedatangan para penjajah, seperti Belanda yang bertujuan ingin menguasai Indonesia, para ulama dan pemimpin Agama Islam selalu berada di garda terdepan dalam menentang dan melakukan perlawanan. Seperti halnya perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa, Cut Nyak Dien di Aceh, perlawanan Sultan Hasanuddin di Sulawesi, perlawanan Teuku Umar di Sumatera Utara, perlawanan Pangeran Hidayat di Banjarmasin dan perlawanan-perlawanan lainnya yang dimotori oleh para ulama di daerah-daerah lain.

Kehadiran Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu upaya melambangkan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham *Ahlussunah wal Jama'ah*. Selain itu, Nahdlatul Ulama (NU) sebagaimana halnya organisasi-organisasi pribumi lain baik yang bersifat sosial, budaya dan keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya sama yaitu memberikan perlawanan terhadap para penjajah. Hal ini didasarkan pada berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan

kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam pada umumnya.

KH. Hasyim Asy'ari sebagai sosok pendiri Nahdlatul Ulama (NU), seorang alim ulama kharismatik Nusantara yang lahir pada tanggal 10 April 1875 di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, memiliki jiwa dan semangat nasionalisme dan anti terhadap penjajah. Sehingga dalam memupuk semangat jiwa nasionalisme rakyat Indonesia, beliau pun membuat sebuah jargon yakni "*Hubbul wathan minal iman*", yang berarti cinta tanah air adalah sebagian dari iman, yang kemudian oleh KH. Abdul Wahab Hasbulloh yang merupakan salah satu dari tiga tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) menciptakan sebuah karya berupa lagu, dengan judul Ya Ahlal Wathon, pada tahun 1934. Diharapkan dengan adanya lagu ini, bisa menambah dan meningkatkan rasa nasionalisme rakyat Indonesia.

Jargon "*Cinta tanah air adalah sebagian dari iman*", merupakan salah satu jargon monumental yang dikemukakan oleh Hadlrotus Syaikh KH. Hasyim As'ari dalam membakar semangat bela negara dan nasionalisme kebangsaan. Meskipun penggalan kalimat singkat tersebut bukan termasuk Hadits, namun secara esensial tidak jauh berbeda dengan Hadits Rasulullah SAW. yang menjelaskan tentang ungkapan kecintaannya terhadap kota Madinah, yaitu:

كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى جُدْرَاتِ الْمَدِينَةِ، أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَكَهَا مِنْ حُبِّهَا.

“Ketika Rasulullah Saw pulang dari bepergian dan melihat dinding kota madinah, beliau mempercepat laju ontanya. Dan bila mengendarai tunggangan (seperti kuda), maka beliau menggerak-gerakkan karena cintanya kepada madinah” (HR. al-Bukhari).¹⁰

Substansi kandungan Hadits tersebut dikemukakan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqolani. Ia menegaskan bahwa “Dalam hadis itu terdapat petunjuk atas keutamaan Madinah dan disyariatkannya mencintai tanah air serta merindukannya”.¹¹

Latar belakang tersebut di atas itulah yang menyebabkan faktor utama berdirinya Nahdlatul Ulama (NU), yaitu untuk mempertahankan ajaran *Islam Ahlussunnah wal Jamaah* dan sebagai wadah dalam memperjuangkan kemerdekaan Negara Indonesia dari cengkeraman penjajah Belanda.¹²

Dalam kontribusinya mengawal Nasionalisme, Nahdlatul Ulama (NU) telah melakukan berbagai peran penting. Bung Karno atas saran Jendral Soedirman khusus kepada KH. Hasyim Asy`ari Roisul Akbar

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari al-Ja`f, *Shahih al-Bukhari*, vol. 3 (Beirut Lebanon: Darul Kutub Ilmiah (DKI), t.t.), h. 23.

¹¹ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, versi III, CD. Maktabah Syamilah, 2021, h. 705.

¹² Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, ed., *Khazanah aswaja: memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan Ahlussunah wal Jama`ah*, Cetakan I (Surabaya: Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 2016), h. 486.

Nahdlatul Ulama (NU) di Tebuireng Jombang untuk meminta mengeluarkan fatwa hukum berjihad membela negara yang bukan berasaskan Islam seperti NKRI. Menanggapi pertanyaan itu KH. Hasyim Asy`ari memberi jawaban tegas bahwa sudah terang bagi umat Islam Indonesia untuk melakukan pembelaan terhadap tanah airnya dari bahaya dan ancaman kekuatan asing.

Sebagai organisasi sosial keagamaan yang sangat anti terhadap penjajahan, Nahdlatul Ulama (NU) memanggil para Konsulnya Sejava dan Madura untuk menentukan sikap terhadap NICA. Pertemuan para konsul NU berlangsung 21-22 Oktober 1945 bertempat dikantor PBNU di Bubutan Surabaya. Maka lahirlah Resolusi Jihad. Yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo diperingati sebagai Hari Santri Nasional.

Resolusi Jihad ini langsung menyebar luas, dan menjadi pegangan moral bagi badan perjuangan Islam di Jawa dan Madura. Setelah resolusi jihad digaungkan maka para kiyai untuk membentuk barisan pasukan Sabilillah yang terkenal dengan nama Hisbullah yang dipimpin oleh KH. Maskur. Dan dua minggu setelah Resolusi Jihad tersebut terjadilah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya dan diperingati sebagai Hari Pahlawan.¹³

Fatwa Hubbul Wathan Minal Iman dirasa sangatlah perlu untuk dijadikan suatu prinsip dalam diri bangsa Indonesia. Karena didalam fatwa

¹³ Nur Rofiq, "Telaah Konseptual Implementasi Slogan Hubb Al-Wathan Min Al-Iman KH. Hasyim Asy`ari dalam Pendidikan Karakter Cinta Tanah Air," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 16, no. 32 (30 Desember 2018): h. 48, <https://doi.org/10.24114/jkss.v16i32.11924>.

Hubbul Wathan Minal Iman memiliki dua karakter yaitu semangat kebangsaan dan cinta akan tanah air. Karena didalam penerapannya, semangat nasionalisme dan bela negara mampu menciptakan dialog kehidupan yang rukun dan damai. Bahkan sangat diperlukan untuk memperkuat sendi-sendi kenegaraan dari berbagai paham radikalisme, ekstremisme, dan semacamnya yang merongrong kebhinnekaan bangsa ini. Sahabat Umar bin Khattab RA. mengatakan:

لَوْلَا حُبُّ الْوَطَنِ لَحَرَّبَ بَلَدُ السُّوءِ فَيُحِبُّ الْأَوْطَانَ عُمِرَتِ الْبُلْدَانُ

“Seandainya tidak ada cinta tanah air, niscaya akan semakin hancur negeri yang terpuruk. Maka dengan cinta tanah air, negeri-negeri termakmurkan”.¹⁴

Disinilah yang harus dipahami bersama untuk menerapkan, mengimplementasikan Hubbul Wathan Minal Iman dalam diri bangsa sebagai suatu prinsip kehidupan.

C. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Pesantren berasal dari santri, yang berarti “terpelajar” (learned) atau “ulama” (Scholar). Jika santri menunjukan kepada murid, maka pesantren menunjuk kepada lembaga pendidikan. Jadi yang dimaksud Pesantren adalah tempat belajar bagi para santri. Pesantren disebut juga “Pondok Pesantren”. Kedua sebutan itu seringkali dipergunakan secara

¹⁴ Ismail Haqqi al-Barousawi, *Tafsir Ruh al-bayan, Juz VI*, CD. Maktabah Syamilah, 2021, h. 320.

bergantian dengan pengertian yang sama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menyebut “Pondok” dan “Pesantren” dengan pengertian yang sama, yaitu “asrama dan tempat murid-murid belajar mengaji”. Pendeknya kedua sebutan tersebut mengandung arti lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat unsur-unsur “Kiai” (pemilik sekaligus guru), “Pengurus/Pengajar” (santri yang sudah tamat dan dilanjutkan masa pengabdian) “santri” (murid), “masjid” atau “mushala” (tempat belajar), asrama (penginapan santri), dan kitab-kitab klasik Islam (pelajaran).¹⁵

Pondok Pesantren disebut sebagai lembaga pendidikan Islam karena merupakan lembaga yang berupaya menanamkan nilai-nilai Islam di dalam diri para santri. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain, yakni jika ditinjau dari sejarah pertumbuhannya, komponen-komponen yang terdapat di dalamnya, pola kehidupan warganya, serta pola adopsi terhadap berbagai macam inovasi yang dilakukannya dalam rangka mengembangkan sistem pendidikan baik pada ranah konsep maupun praktik.¹⁶

Pondok Pesantren juga sering dinamakan dengan beberapa istilah, seperti surau, dayah, meunasah, bale, dan rangkang. Dari semua istilah tersebut, Pesantren atau Pondok Pesantren merupakan istilah yang paling

¹⁵ Rizky Agustian, “Modernisasi Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren Al Khairiyah Pusat Citangkil Kota Cilegon” (Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin, 2018), h. 56.

¹⁶ Abd Halim Soebahar, *Modernisasi pesantren: studi transformasi kepemimpinan kiai dan sistem pendidikan pesantren*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Penerbit & distribusi, LKiS Yogyakarta, 2013), h. 33.

dikenal dan bertahan hingga sekarang. Dapat diambil kesimpulan bahwa Pesantren atau Pondok Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat Kiai (pimpinan dan pengajar), santri (murid), tempat belajar, tempat penginapan, dan bahan pelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai islam di dalam diri para santri.

2. Sejarah Pertumbuhan Pondok Pesantren

Sebagai unit lembaga pendidikan dan sekaligus lembaga dakwah, pesantren pertama kali dirintis oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim pada 1399 M yang berfokus pada penyebaran agama Islam di Jawa. Selanjutnya tokoh yang berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren adalah Raden Rahmat (Sunan Ampel). Pesantren pertama didirikan di Kambangkuning yang waktu itu dihuni oleh tiga orang santri yaitu Wiryoyo, Abu Hurairoh, dan Kiai Bangkuning. Pesantren tersebut kemudian dipindahkan ke kawasan Ampel di seputar Delta, Surabaya, karena ini pulaulah Raden Rahmat dikenal dengan sebutan sunan Ampel. Selanjutnya, putra dan putri sunan Ampel mulai mendirikan beberapa Pesantren baru, seperti Pesantren Giri oleh Sunan Giri, Pesantren Demak oleh Raden Fatah, dan Pesantren Tuban oleh Sunan Bonang.¹⁷

Pada awal kemunculan pondok pesantren, para santri ditampung dan difasilitasi di rimah Kyai. Rumah Kyai, selain sebagai tempat tinggal, di masa-masa awal dijadikan pula sebagai pusat kegiatan ibadah dan pendidikan. Akan tetapi disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah

¹⁷ Soebahar, h. 34.

anggota masyarakat yang datang, akhirnya rumah Kiai tidak memadai lagi untuk menampung para santri. Dari sinilah kemudian muncul inisiatif dari Kiai dan para santri tentunya juga didukung oleh masyarakat sekitar untuk mendirikan langgar atau masjid yang akan dijadikan pusat kegiatan ibadah dan belajar sehari-hari, serta pondokan sebagai tempat tinggal para santri.¹⁸

Pesantren diperkirakan mengalami pertumbuhan pesat sebagai lembaga pendidikan Islam pada abad ke-19. Perkiraan ini didukung oleh dua informasi, *Pertama*, inspeksi pendidikan untuk pribumi oleh Belanda pada tahun 1873 M. menyebutkan jumlah pesantren yang cukup besar, yang berkisar pada angka 20 ribu sampai 25 ribu dengan jumlah santri berkisar pada 300 ribu orang. Melihat besarnya jumlah pesantren tersebut tampaknya pendataan mencakup semua tempat pembelajaran, baik itu pesantren, nggon ngaji, mushala, dan sebagainya.

Lepas dari akurasi angka tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa pada saat itu pesantren telah terkonsolidasi sebagai lembaga pendidikan Islam. *Kedua*, “catatan perjalanan” Snouck Hurgronje pada abad ke 19 di beberapa wilayah Indonesia. Catatan itu tidak hanya mengkonfirmasi adanya sejumlah pesantren yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, tetapi juga merekam kehidupan didalamnya, dan menelusuri jaringannya (network) dengan Mekkah. Snouck Hurgronje antara lain mengunjungi Garut di Jawa Barat, dan mencatat pesantren

¹⁸ Soebahar, h. 35.

Caringin (H. Muhammad Rifa'i), pesantren Sukaregang (Kiai Adrangi), dan pesantren Kiai Koneng (H. Muallim).¹⁹

3. Komponen Utama Pondok Pesantren

Setiap pesantren ternyata berproses dan bertumbuh kembang dengan cara yang berbeda-beda di berbagai tempat, baik dalam bentuk maupun kegiatan-kegiatan kurikulumnya karena Pesantren itu sendiri memiliki ciri khas dan karakter masing-masing. Namun diantara perbedaan-perbedaan tersebut masih bisa diidentifikasi bahwa mayoritas adanya pesantren-pesantren itu memiliki pola serta tujuan yang sama.

Persamaan pola tersebut, menurut A. Mukti Ali, dapat dibedakan dalam dua segi, yaitu segi fisik dan segi non fisik. Segi fisik terdiri dari empat komponen pokok yang selalu ada pada setiap pondok pesantren, yaitu: Kiai sebagai pemimpin, pendidik, guru, dan panutan, santri sebagai peserta didik atau siswa, masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan peribadatan, dan pondok sebagai asrama untuk mukim santri. Adapun yang non fisik, yakni yang terkait dengan komponen non fisik, adalah pengajian (pengajaran agama). Pengajian ini disampaikan dengan berbagai metode yang secara umum nyaris seragam, yakni standarisasi kerangka sistem nilai baik dan buruk yang menjadi standar kehidupan dan perkembangan pondok pesantren.²⁰ Singkatnya bahwa komponen atau elemen dari pesantren itu sendiri adalah adanya sebuah pondok atau asrama-asrama yang didalamnya terdapat beberapa

¹⁹ Arief Subhan, *Lembaga pendidikan Islam Indonesia abad ke-20: pergumulan antara modernisasi dan identitas*, Cetakan 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), h. 70.

²⁰ Soebahar, *Modernisasi pesantren*, h. 37.

kamar-kamar, mushala, masjid, gedung madrasah, pengajaran kitab-kitab klasik, santri dan kiai dan lain sebagainya.²¹

4. Pola Kehidupan di Pondok Pesantren

Pola kehidupan pesantren termanifestasikan dalam istilah “pancajiwa” yang di dalamnya memuat “lima jiwa” yang harus diwujudkan dalam proses pendidikan dan pembinaan karakter santri. Kelima jiwa tersebut adalah jiwa keikhlasan, jiwa kemandirian, jiwa kesederhanaan, jiwa ukhuwah Islamiyah, dan jiwa kebebasan yang bertanggung jawab.²² Berdasarkan “pancajiwa” inilah bagaimana pengaruh pendidikan pesantren itu sangat besar. “Pancajiwa” juga dijadikan pondasi utama sistem pendidikan. Hal ini karena pembinaan karakter dan mentalitas santri di Pesantren memang sangatlah diutamakan.

Pesantren sangat menekankan pentingnya mempelajari ilmu-ilmu keislaman (*at-tafaquh fiddin*) dari pada ilmu-ilmu lain. Dhofier menulis bahwa Pendidikan Pesantren bertujuan “meninggikan moral”, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, dan menyiapkan para murid untuk hidup sederhana dan bersih hati.²³

Abdurrahman Wahid menjelaskan bahwa pesantren merupakan sebuah kultur dengan pola kehidupan yang unik, ia mampu bertahan selama berabad-abad dalam mempergunakan nilai-nilai hidupnya sendiri.

²¹ Subhan, *Lembaga pendidikan Islam Indonesia abad ke-20: pergumulan antara modernisasi dan identitas*, h. 71.

²² Soebahar, *Modernisasi pesantren*, h. 44.

²³ Subhan, *Lembaga pendidikan Islam Indonesia abad ke-20: pergumulan antara modernisasi dan identitas*, h. 73.

Oleh karena itu dalam jangka panjang, pesantren berada dalam kedudukan kultural yang relatif lebih kuat dari pada masyarakat di sekitarnya.²⁴

Pesantren tidak mengenal umur dalam pembelajaran didalam kelas maupun diluar kelas. Tingkatan seorang santri diukur dari jenis kitab yang dipelajari dan bidang-bidang keilmuan yang dikaji. Dalam sistem pembelajarannya, kitab-kitab elementer khususnya untuk “ilmu-ilmu alat” (seperti Ilmu Nahwu dan Ilmu Shorof), harus dipelajari terlebih dahulu sebelum meningkat pada bidang-bidang keilmuan lain seperti Ilmu Al-Qur’an, Ilmu Tafsir Al-Qur’an, Hadits, Ilmu Tauhid, Ilmu Akhlak, Ilmu Fiqh, Kaidah Fiqh, dan Pegon atau tata penulisan makna gundul. Hal ini dilakukan karena dalam Pendidikan Pesantren itu yang diajarkan adalah dengan menggunakan kitab kuning atau kitab gundul. Dinamakan kitab kuning karena kebanyakan kitab yang dipakai adalah kitab-kitab yang memiliki kertas berwarna kuning, kemudian dinamakan kitab gundul, karena para pengkaji kitab di Pesantren menggunakan kitab yang belum memiliki makna, kemudian seorang pengajar akan membacakan makna dari kitab-kitab itu selanjutnya para pengkaji atau para santri akan memaknainya. Oleh sebab itu, para santri diharapkan sudah dapat menguasai ilmu alat terlebih dahulu untuk mempermudah baginya dalam mengkaji kitab-kitab yang notabenenya semuanya menggunakan gramatika Arab. Sedangkan Ilmu Tasawuf, yang seringkali dikaitkan dengan tarekat

²⁴ HM Muntahibun Nafis, “Pesantren dan Toleransi Beragama” 02 (2014): h. 203.

tertentu, biasanya dipelajari pada tahap akhir pendidikan pesantren. Hal ini dikarenakan dalam Pendidikan Pesantren terdapat istilah “jangan mengkaji ilmu (kitab) yang belum tingkatannya”. Oleh karena itu, Ilmu Taswuf diajarkan pada tahap akhir pembelajaran Pondok Pesantren, karena Ilmu ini merupakan suatu ilmu yang dalam kategori di Pondok Pesantren merupakan kategori ilmu yang paling tinggi, sehingga para pengkajinya juga adalah merupakan santri-santri senior yang dirasa sudah waktunya untuk mengkaji ilmu tersebut.

Dalam pesantren menganut sistem pengajaran sorogan, bandungan, dan weton dengan materi pelajaran agama. Pesantren tipe ini lumrahnya di kategorikan sebagai Pesantren Salafi atau Tradisional. Namun demikian, ketika upaya-upaya inovasi mulai dilakukan, sebagai respon atas temuan-temuan baru, maka komponen pesantrenpun otomatis berubah. Dalam konteks ini misalnya, pesantren tampak mulai melakukan pengembangan pendidikan di bidang keterampilan, pengembangan sistem sekolah umum, atau pengembangan madrasah. Dari sinilah kemudian kategori Pesantren dengan sendirinya berubah dari Pesantren Salafi menjadi Pesantren Khalafi.²⁵

5. Tujuan Pondok Pesantren

Tujuan terbentuknya Pondok Pesantren adalah: (1) Tujuan umum, yaitu membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam, yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi mubaligh Islam

²⁵ Soebahar, *Modernisasi pesantren*, h. 47.

dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya. (2) Tujuan khusus, yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh Kiai yang bersangkutan serta dalam mengamalkan dan mendakwahnya dalam masyarakat.²⁶

Menurut Mahfudz, pesantren mempunyai tujuan:

- 1) Mendidik dan mengembangkan fiqhuddin (pendalaman ilmu agama) yang telah banyak membentuk sikap dan perilaku keteladanan, sederhana, mandiri, disiplin, lentur dan menghasilkan tokoh-tokoh masyarakat termasuk kiai atau ulama dalam skala kecil maupun luas.
 - 2) Sebagai lembaga kemasyarakatan yang mampu menanamkan wawasan kemasyarakatan yang akhirnya para santri mampu membentuk komunitas atau paling tidak mewarnai suatu komunitas yang terbatas maupun yang luas dalam bermasyarakat dan berbangsa, di samping pengabdian, sikap ta'awun, tasammuh dan thaatul ijtima'.²⁷
6. Kurikulum Pondok Pesantren

Ciri-ciri khusus dalam Pondok Pesantren adalah isi kurikulum yang dibuat terfokus pada ilmu-ilmu agama, misalnya ilmu sintaksis Arab, morfologi Arab, hukum Islam, sistem yurisprudensi Islam, Hadist, Tafsir Al-Quran, Teologi Islam, Tasawuf, Tarikh, dan Tetorika. Literatur ilmu-ilmu tersebut memakai kitab-kitab klasik yang disebut dengan istilah “kitab kuning” dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) kitab-kitabnya berbahasa

²⁶ Abdul Mujid, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cetakan ke 5 (Jakarta: Kencana, 2017), h. 235.

²⁷ Abdul Qodir, “Pembaharuan Sistem Pendidikan Pesantren dalam Pembentukan Kemandirian Santri (Studi Kasus Pesantren Al-Muhajirin Palangka Raya Kalimantan Tengah),” dalam *Alqalam: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol.1, no. 1 (Juni dan Desember 2004): h. 60.

Arab, (2) umumnya tidak memakai syakal, bahkan tanpa titik dan koma, (3) berisi keilmuan yang cukup berbobot, (4) metode penulisannya dianggap kuno dan relevansinya dengan ilmu kontemporer kerap kali tampak menipis, (5) lazimnya di kaji dan dipelajari di Pondok Pesantren, (6) banyak diantara kertasnya berwarna kuning.²⁸

Dalam konteks pesantren, kurikulum merupakan suatu rencana pelajaran tertentu yang ingin diajarkan kepada santri untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan oleh pengelola Pesantren, diantara tujuannya adalah:

- 1) Menghasilkan tokoh-tokoh masyarakat dan kyai atau ulama baik skala kecil maupun luas.
- 2) Menciptakan lulusan (santri) yang mempunyai kemampuan analisis dan kemampuan antisipatif.
- 3) Menjadikan santri berkepribadian muhsin dan memiliki pemahaman agama yang mendalam atau tidak sekedar berpredikat muslim apalagi mukmin.²⁹

Dari uraian diatas dapat diketahui tentang penyelenggaraan sistem pendidikan di Pondok Pesantren dewasa ini dapat digolongkan menjadi:

- a) Pondok Pesantren adalah Lembaga Pendidikan dan pengajaran Agama Islam, yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran diberikan dengan cara non klasikal (bandongan dan sorogan), dimana seorang

²⁸ Mujid, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 236.

²⁹ Soebahar, *Modernisasi pesantren*, h. 61.

kiai mengajar santrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis pada abad pertengahan, sedang santri biasanya tinggal di asrama atau pondok.

- b) Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang ada pada dasarnya sama dengan pondok pesantren diatas, tetapi para santrinya tidak disediakan pondokan (komplek), namun tinggal tersebar di seluruh penjuru desa sekeliling pesantren tersebut (santri kalong) dimana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam diberikan dengan sistem wetonan.
- c) Pondok Pesantren dewasa ini merupakan lembaga gabungan antara sistem Pondok Pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem bandongan dan sorogan kepada santri, disediakan pondokan ataupun merupakan santri kalongan yang dalam istilah pendidikan pondok modern memenuhi criteria non formal, serta menyelenggarakan pula pendidikan formal berbentuk madrasah dan bahkan sekolah umum dalam berbagai tingkatan dan aneka kejuruan menurut kebutuhan masyarakat masing-masing.

Berdasarkan tiga bentuk sistem pendidikan diatas, pada kenyataannya sistem yang ketiga saat sekarang banyak bermunculan dan berkembang sebagai bentuk respon atas tuntutan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan teknologi era globalisasi. Perpaduan sistem tradisional dan modern berusaha menemukan solusi atas kelemahan dan kekurangan masing-masing.

Dipihak lain, Pondok Pesantren kini mengalami transformasi kultur, sistem, dan nilai. Pondok pesantren yang dikenal dengan salafiyah (kuno) kini telah berubah menjadi dengan khalafiyah (modern). Transformasi tersebut sebagai jawaban atas kritik-kritik yang diberikan kepada pesantren dalam arus transformasi ini, sehingga dalam sistem dan kultur pesantren terjadi perubahan yang drastis, misalnya: (1) perubahan sistem pengajaran dari perseorangan atau sorogan menjadi sistem klasikal yang kemudian kita kenal dengan istilah madrasah (sekolah), (2) pemberian pengetahuan umum di samping masih mempertahankan pengetahuan agama dan bahasa Arab, (3) bertambahnya komponen pendidikan Pondok Pesantren, misalnya keterampilan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat sekitar, kepramukaan untuk melatih kedisiplinan dan pendidikan agama, kesehatan dan olahraga, serta kesenian yang Islami, dan (4) lulusan Pondok Pesantren diberikan syahadah (ijazah) sebagai tanda tamat dari pesantren tersebut dan ada sebagian syahadah tertentu yang nilainya sama dengan ijazah negeri.³⁰

7. Macam-macam Pondok Pesantren

Menurut Dhoifer, setiap Pesantren berkembang melalui cara-cara yang bervariasi. Pesantren sendiri terbagi ke dalam dua kategori, yaitu salafi dan khalafi. Sedikit berbeda dengan Dhofier, Abdullah Syukri Zarkasyi mengklasifikasikan pesantren ke dalam tiga kategori, yaitu

³⁰ Mujid, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 237-238.

pesantren tradisional, pesantren modern, dan pondok pesantren perpaduan antara tradisional dengan modern.³¹

Persentuhan dua sistem pesantren dan madrasah, Departemen Agama dalam hal ini membagi bentuk Pondok Pesantren menjadi empat bentuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang bantuan Pondok Pesantren menjadi:

- 1) Pondok Pesantren tipe A adalah Pondok Pesantren yang seluruhnya dilaksanakan secara tradisional.
- 2) Pondok Pesantren tipe B adalah Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal (madrasi).
- 3) Pondok Pesantren tipe C adalah Pondok Pesantren yang hanya merupakan asrama, sedangkan santrinya belajar diluar.
- 4) Pondok Pesantren tipe D adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem Pondok Pesantren sekaligus sistem sekolah dan madrasah.³²

D. Pendidikan Kebangsaan (Nasionalisme)

1. Pengertian Pendidikan Kebangsaan (Nasionalisme)

Pengertian pendidikan kebangsaan yang peneliti kutib dari Pendidikan Nasional menjelaskan, dapat ditinjau secara konsepsional dan operasional. Secara konsepsional pendidikan berwawasan kebangsaan mencakup cirri-ciri dan pengertian sebagai berikut:

³¹ Soebahar, *Modernisasi pesantren*, h. 48.

³² Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Perkembangan dan Pertumbuhannya* (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003), h. 15.

- a. Upaya sistematis dan kontinue yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam peranannya pada saat sekarang dan masa yang akan datang.
- b. Upaya pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pemahaman, sikap dan tingkah laku siswa yang menonjolkan persaudaraan, penghargaan positif, cinta damai, demokrasi dan keterbukaan yang wajar dalam berinteraksi sosial dengan sesama warga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan sesama warga dunia.

Keseluruhan upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab melalui upaya bimbingan, pengajaran, pembiasaan, keteladanan, dan latihan sehingga dapat menjalankan peranannya pada saat sekarang dan masa yang akan datang (Departemen Pendidikan Nasional) Secara operasional, pendidikan berwawasan kebangsaan adalah layanan bimbingan pengajaran atau pelatihan untuk meningkatkan paham, rasa, dan semangat kebangsaan yang baik pada siswa, yang ditunjukkan dengan mengutamakan tingkah laku bersaudara, demokratis, saling menerima dan menghargai, serta saling menolong dalam berinteraksi sosial dengan sesama warga Indonesia.

2. Tujuan Pendidikan Kebangsaan

Berbicara mengenai tujuan pendidikan kebangsaan terlebih dahulu kita harus menyadari secara seksama, bahwa kita hidup di Negara yang relatif plural dengan berbagai macam kelompok suku, budaya, ras serta

Agama dan keyakinan yang harus dimaknai secara positif atas keragaman tersebut. Indonesia sebagai satu negara yang berdasarkan Pancasila telah disepakati oleh founding father.

Pendidikan sebagai alat untuk membungkus atau mewadai cara pandang yang berbeda dalam memahami sebuah persoalan kemasyarakatan harus mampu menjadi tali ikat untuk menumbuhkan semangat persatuan dan rasa kebangsaan, bahwa kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air, jikalau ada satu diantara kita yang disakiti atau merasa tersakiti, atau tanah air kita ada yang mencuri demi seculil kepentingan, maka pantang bagi kita untuk membiarkan.

Maka dari itu, pentinglah kita untuk memahami dan mengimplementasikan dari pada tujuan pendidikan yang berwawasan kebangsaan di dalam semua lini jenjang pendidikan baik formal, non-formal, maupun in-formal. Tujuan dari pendidikan berwawasan kebangsaan meliputi, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengertian, pemahaman, dan persepsi yang tepat tentang persatuan dan kesatuan antar sesama warga NKRI.
- b. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai penerus Bangsa Indonesia.
- c. Mengembangkan kepekaan sosial, solidaritas, toleransi, dan saling mengenal serta saling menolong antar sesama warga NKRI walaupun berbeda latar belakang.

- d. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam mengelola konflik antar-pribadi dan antar kelompok.

Adapun tujuan dari pendidikan berwawasan kebangsaan tidak berbeda dari visi dan misi pendidikan nasional, yaitu menjadikan peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.³³

Pendidikan kebangsaan berorientasi terhadap: 1) Paham kebangsaan, 2) Rasa kebangsaan, 3) Semangat kebangsaan. Paham kebangsaan merupakan refleksi dari kesadaran individu akan kebhinneka tunggal ikaan masyarakat Indonesia. Refleksi kesadaran tersebut dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang majemuk.

Jadi, Pendidikan Islam kebangsaan adalah, suatu cara pandang sistem pendidikan Islam yang mempunyai nilai-nilai, Visi sosial kemasyarakatan yang dilandaskan pada ajaran Agama Islam sebagai sarana integrasi bangsa, berarti rasa kesatuan yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia berdasarkan cita-cita yang sama dalam satu ikatan organisasi kenegaraan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah proses untuk menuju terwujudnya nasionalisme Indonesia yang berlandaskan cita-cita dan tujuan bersama.

³³ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, 2009:3

3. Materi Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan adalah bagian dari pembangunan bangsa, tentunya harus menekankan pada upaya untuk mencerdaskan kehidupan dan semangat kebangsaan, sehingga menjadi manusia Indonesia yang memiliki kepribadian utuh. Salah satu ciri manusia yang utuh adalah bermutu, manusia yang memiliki tanggung jawab atas keilmuannya dan tanggung jawab atas kebangsaannya dengan sendirinya memiliki wawasan kebangsaan.

Berkaitan dengan materi pendidikan berwawasan kebangsaan, perlu melihat realitas pendidikan di Indonesia hari ini. Fenomena yang ada bahwa, beberapa kelompok yang merongrong ataupun menggerogoti semangat kebangsaan justru beberapa dari output lembaga pendidikan kita. Maka dirasa perlu materi pendidikan berwawasan kebangsaan yang diintegrasikan dalam materi pelajaran diberbagai jenjang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Adapun materinya sebagai berikut:

a. Cinta Tanah Air

Setiap peserta didik harus mencintai tanah air sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya yang selalu mendapat ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, antara lain: diwujudkan menjaga lingkungan hidup, mengenal wilayah tanah air, dan mencintai produk dalam negeri agar tumbuh rasa nasionalisme. Sehingga, kesadaran bertanah air satu, tanah air Indonesia menjadi semangat bersama bagi semua peserta didik

b. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Peserta didik harus dituntut untuk mempunyai kesadaran atas tanggung jawabnya sebagai masyarakat yang didukung pengetahuan, keterampilan, kompetensi serta pribadi manusia yang beriman, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan bersikap demokratis, antara lain diwujudkan dengan bersikap disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai dan menghormati, menjaga kerukunan, berjiwa gotong royong, mendahulukan kewajiban dari pada hak sebagai warga negara, serta mendahulukan kepentingan negara dan bangsa dari pada kepentingan pribadi dan kelompok. Sehingga peserta didik mampu menyadari atas kemajemukan yang ada dalam bangsa ini dan melekat dalam jiwa-jiwa sanubari, baik suku, ras, agama dan budaya sebagai bagian dari pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pancasila adalah dasar ideologi negara yang sah, dan tidak ada ideologi lain. Ketentuan ini adalah hal yang mutlak dan telah disepakati oleh founding father republik ini. Nilai-nilai ajaran yang ada pada pancasila harus dimasukkan dalam lini materi pelajaran. Sehingga mampu mewujudkan tatanan peserta didik yang mengacu dan berlandaskan ideologi Pancasila, antara lain diwujudkan dengan bertaqwa kepada Tuhan YME, menjalankan kewajiban agama, mempunyai kesadaran membantu sesama, memelihara persatuan dan

kesatuan, mengedepankan musyawarah untuk mufakat, serta mewujudkan keadilan sosial.

Dengan materi seperti ini, semua peserta didik diberbagai jenjang pendidikan termasuk para pendidik mempunyai hak dan kewajiban melaksanakan semangat kebangsaan dan Bela Negara dalam semua aspek kehidupan. Pendidikan berwawasan kebangsaan harus berupaya membuat peserta didik menjadi senang dan riang gembira, tanpa melupakan disiplin dan tanggung jawab. Disamping itu, menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, sehingga tidak terkesan “wajib militer” dan/atau “militerisasi sipil”, sehingga menakutkan. Gunakan diskusi dan praktek lapangan yang sederhana untuk mudah meresapi dan menghayati dalam pendidikan kebangsaan.

E. Landasan Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, agar supaya penelitian ini tidak terlalu melebar pembahasannya, maka peneliti akan berfokus pada tiga tahapan sesuai dengan fokus penelitian peneliti yang akan diawali dengan bagaimana Pendidikan Nasionalisme dan Prinsip dari Hubbul Wathan Minal Iman kemudian dilanjutkan dengan bagaimana peranan dan kriteria seorang guru atau pengajar dalam upaya pembentukan jiwa nasionalisme dalam proses Pendidikan Nasionalisme serta bagaimana kurikulum yang digunakan dalam pendidikan nasionalisme di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur itu sendiri.

Adapun pada sub-sub lain dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, mungkin kedepannya akan digunakan oleh peneliti dalam tahap pembelajaran atau tugas penelitian dalam jenjang pendidikan selanjutnya. Bahkan bisa digunakan oleh para peneliti-peneliti lainnya untuk digunakan sebagai fokus penelitiannya.

